

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DALAM Mendukung
PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
DI KABUPATEN SORONG PROPINSI PAPUA BARAT**

**CHRISTIN DESSY SAHUDEGE
BURHANUDDIN KIYAI
ALDEN LALOMA**

Implementation of Road Infrastructure Development Policy in Support of Community Economic Development in Sorong. This study aims to find out about the Road Infrastructure Development in Support of Economic Development conducted by the government of Sorong in particular Umum. Oleh Works Department for the government's role in encouraging the development area should be done with a set of policies and actions that can improve regional economy Sorong.

This study was conducted in Sorong, the process of data collection is done by observation, interview and documentation. Informants in this study consisted of 14 people. The data collected later described by using qualitative methods.

Results from this study indicate that the construction of road infrastructure in Sorong Regency is good enough, but not fully wishes of the people can be responded to by the government, especially the Department of Public Works. Thus the author can propose to the government to the natural resources that could be used for the benefit of local communities in Sorong for the present and the future.

Keywords: Implementation, Policy, Infrastructure Roads and Economic Development

PENDAHULUAN

Terbelakangnya daerah pedesaan di negeri ini masih merupakan masalah besar yang belum teratasi. Daerah pedesaan di pedalaman sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan. Pembangunan yang dimaksud ialah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana daerah. Di berbagai pelosok tanah air masih terdapat ribuan daerah pedesaan yang sangat timpang keadaannya dibandingkan dengan kota yang lengkap akan sumber daya.

Maka arah kebijakan pemerintah Kabupaten Sorong dalam pembangunan daerah dapat kita lihat pada salah satu poin arah kebijakan adalah menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi termasuk kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Sorong dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui menuju masyarakat yang berkualitas, maju,

dan mandiri dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya. Grindle (1980:7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle (1980:7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah (*dasein and dasollen*). Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn. (Grendle, 1980:7) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Kota sebagai pusat kegiatan baik kegiatan pemerintahan dan perdagangan menjadikannya sebagai tempat yang

berlimpah sumber daya. Kota yang memiliki infrastruktur jalan yang lengkap dan kemudahan dalam akses, menjadi daya tarik yang besar untuk kegiatan khususnya perdagangan demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembangunan adalah suatu hal yang penting. Pembangunan (*development*) merupakan suatu fenomena yang bermuka banyak (*multifaceted*). Ia memancing pertanyaan-pertanyaan sulit tentang nilai-nilai, teknik-teknik dan pilihan-pilihan. Pembangunan memunculkan kembali pertanyaan klasik tentang hakekat “masyarakat yang baik”, dan juga masalah siapakan yang harus menentukan isi dan tujuan masyarakat. Karena masalah-masalah itu luas dan sulit, mudahlah orang mengaburkannya dalam generalisasi, menggunakan istilah pembangunan sebagai eufimisme atau ungkapan yang lebih halus untuk sebuah perubahan, modernisasi (pergeseran sikap dan mental), pertumbuhan dan lain sebagainya (Bryan dan white, 1985).

Dengan kata lain pembangunan pada dasarnya menyangkut proses perbaikan (Seers, dalam Tjokrowinoto, 1987). Konteks rumusan yang demikian ini menghendaki pentingnya perencanaan dalam melakukan perubahan kondisi. Perencanaan pembangunan sangat dilandasi pilihan paradigma yang ditentukan oleh penyelenggara Negara berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian pengertian pembangunan menjadi “culture specific”, “situation specific”, “time specific”. Budaya, situasi, dan waktu yang mewarnai pembangunan tersebut kiranya melandasi arti pentingnya peninjauan kembali kebijakan pembangunan dalam konteks situasi yang berkembang akhir-akhir ini.

Pembangunan diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis untuk menciptakan perubahan yang lebih baik

dengan peningkatan pendapat nasional Bruto.(Todaro, 1998).

Berbeda keadaannya dengan daerah perkotaan, pedesaan seperti termarginalkan(persaingan kehidupan) oleh keterbatasan hidup. Pembangunan jalan yang tidak merata membuat kelumpuhan di berbagai sektor kehidupan seperti keadaan ekonomi masyarakat pedesaan yang makin lemah. Misalnya infrastruktur jalan yang tidak memadai dan kurangnya perawatan merupakan pemandangan umum yang ada. Pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan sangatlah jauh dari apa yang diharapkan untuk bisa menaikkan taraf hidup masyarakat desa dan mengangkat perekonomian di pedesaan.

Kabupaten Sorong sangat luas dengan luas wilayah sebesar 12.159,42 km², yang terdiri dari daratan seluas 11.644,77 km², dan luas lautan sebesar 514,65 km². Kabupaten Sorong memiliki 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, yaitu Kecamatan Klaso, Kecamatan Beraur, Kecamatan Klawak, Kecamatan Salawati Timur, Kecamatan Salawati Selatan, Kecamatan Sayosa, Kecamatan Makbon, Kecamatan Klamono, Kecamatan Salawati, Kecamatan Seget, Kecamatan Aimas, Kecamatan Maudus, Kecamatan Klayili, Kecamatan Klabot, Kecamatan Mayamuk, Kecamatan Segun dan Kecamatan Mariat. Dan yang menjadi pusat kota dari Kabupaten Sorong ialah terletak di Kecamatan Aimas dan pusat dari pemerintahan Kabupaten Sorong adalah Kecamatan Mariat. Namun dilihat dari segi ekonomi kehidupan masyarakat di Kabupaten Sorong sudah sangat berkembang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Sorong.

Pembangunan infrastruktur jalan yang berada antar desa dengan desa maupun desa dengan kota yang merupakan sarana mobilitas utama untuk melakukan berbagai proses transaksi, terutama jaringan

jalan sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat yang berada di Kabupaten Sorong.

Dalam konteks ekonomi, infrastruktur jalan bukan hal sosial masyarakat yang merupakan tempat bertumpuh dalam perkembangan ekonomi. Tanpa ketersediaan infrastruktur jalan dan pembangunan sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam meningkatkan ekonomi yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi sangat sulit dicapai. Hal ini akan berakibat pada proses pembangunan ekonomi yang tidak berjalan dengan baik dan masyarakat mengalami kesulitan untuk melakukan berbagai proses transaksi antar desa ke desa maupun desa dengan kota.

Namun hal ini mulai mendapat respon yang sangat baik dari kalangan pemerintah Kabupaten Sorong. Maka dengan hal tersebut, pemerintah semakin memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Sorong, dengan demikian jalan sebagai modal ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai modal dalam masalah yang dihadapi masyarakat kabupaten sorong. Saat ini adalah taraf ekonomi yang masih tergantung pada infrastruktur jalan darat, karena hanya jalan darat yang dapat menghubungkan antara desa dengan desa maupun desa dengan kota. Oleh karena itu pemerintah dapat memperhatikan pembangunan jalan dengan demikian dapat menunjang perekonomian masyarakat.

Kabupaten Sorong sangat kaya akan sumber daya alam yang dapat menopang perekonomian masyarakat, namun terkendala dengan adanya infrastruktur jalan darat yang masih kurang baik sehingga masalah ekonomi masih belum bisa diatasi. Namun usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat saat ini bisa dilihat dengan adanya beberapa perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Sorong.

Kabupaten Sorong adalah salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Papua Barat. Maka pusat kota dari Kabupaten Sorong adalah Kecamatan Aimas yang kini menjadi daerah Kawasan Ekonomi Khusus, maka Kecamatan Aimas telah di tetapkan menjadi pusat kota dari Kabupaten Sorong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996 pada pasal 7 ayat 1 & 2 ditetapkan Kecamatan Aimas dan Ibu Kota Aimas.

Pandangan saat ini cukup baik, oleh karena saat ini pembangunan jalan dan perbaikan jalan sudah sangat memuaskan di daerah kabupaten sorong. Pembangunan jalan darat untuk saat ini membawah masyarakat kabupaten sorong menuju perekonomian yang sangat baik. Karena semua bidang dan sektor yang ada di kabupaten Sorong telah di bangun dengan sangat baik oleh Bupati Sorong dan terutama pada masalah ekonomi maka telah dilakukan pembangunan pasar-pasar permanen dan pasar-pasar serbaguna yang sudah di bangun di pusat Kabupaten Sorong yaitu Kecamatan Aimas.

Pembangunan infrastruktur jalan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sorong dalam rangka mendukung kegiatan dan perputaran roda perekonomian masyarakat Kabupaten Sorong khususnya kegiatan dalam bidang perekonomian seperti kegiatan perdagangan dan kegiatan industri telah mendapat respon baik oleh masyarakat yang berada di seluruh Kabupaten Sorong.

Dengan demikian infrastruktur jalan yang bagus dan baik maka akan meningkatkan dan mempercepat arus barang dan jasa yang tentu mempunyai akibat besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat secara cepat dan berujung

kepada peningkatan perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam hal pembiayaan pembangunan jalan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Maka berdasarkan dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin mengetahui permasalahan dan ingin mengetahui solusi dari permasalahan yang terangkum dalam penulisan Skripsi dengan judul : Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat.

METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Meleong, (1996) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrument yakni sebagai pengumpul data secara langsung. Data yang diteliti dapat mengalir apa adanya (Alamiah) tanpa adanya seting-seting. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif dapat diperlukan informan. Antara informan dan peneliti memiliki hubungan yang sangat erat, karena tanpa informan penulis tak akan banyak mendapatkan informasi yang mengalir masuk khususnya dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada masalah pembangunan infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya dapat direspon oleh pemerintah dalam memberikan suatu

perubahan ekonomi bagi masyarakat. Maka kiranya pemerintah dapat melakukan kebijakan yang dibuat sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan demikian pemerintah dapat mengatasi semua masalah implementasi tersebut dengan menekankan empat hal pokok yang dikemukakan oleh Edwards III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Birokrasi dan Pelaksaaan serta Struktur organisasi dan tata kerja. Dengan demikian fokus penelitian terhadap 14 Informan yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung demi mengumpulkan data-data terhadap masalah pembangunan infrastruktur jalan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah dapat mengatasi masalah pembangunan infrastruktur jalan yang dapat berakibat terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Sorong. Maka fokus dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengamati akan kinerja pemerintah. Dengan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, disebutkan bahwa wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan nasional dan penyelenggaraan jalan secara umum yang mencakup (1) penyusunan petunjuk teknis, (2) pemberian sosialisasi, (3) kewajiban dan penyelenggaraan jalan memprioritaskan pemeliharaan jalan.

Kedua, Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 & 4 yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, dan Prinsip Perekonomian Nasional.(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dan ke (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu melalui :

1. Pengamatan/Observasi

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observasi atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah untuk memperoleh makna yang rasional, maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstruktur, dimana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural.

3. Studi Dokumentasi

Dalam penentuan studi dokumen maka dilakukan dari hasil wawancara mendalam melalui catatan pribadi penulis berupa buku harian yang disebut buku memo. Buku memo akan diberi simbol sesuai dengan hasil wawancara misalnya penulis mewawancarai salah satu anggota pegawai/aparaturnya lalu penulis akan mencatat dari hasil catatan harian, berupa tanggal hasil wawancara, kemudian jenis wawancara yang dilakukan, serta hasil jawaban yang diberikan. Kalaupun diperlukan rekaman dari tape recorder, maka hasil wawancara akan dievaluasi sesuai dengan jawaban masing-masing untuk mendapatkan kesimpulan tentatif.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

interaktif. Menurut Miles dan Humberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut.

1. Reduksi Data (Reduction Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (Display Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya dalam penelitian. Dalam hal ini Miles dan Humberman (1984) menyatakan "yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif/menguraikan(menjelaskan).

3. Penarikan Kesimpulan(Verification)

Verifikasi data penelitian yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori

tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang dapat dijadikan hasil penelitian yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Maka, demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan teori dari Edwards III Tahun 1984 mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan merumuskannya kedalam empat faktor yaitu Komunikasi dalam pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan tidak secara baik jalinan informasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat, maka salah satu masalah dalam pembangunan adalah partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Namun dapat dilihat dengan adanya Sumber Daya yang cukup baik di Kabupaten Sorong dapat menunjang suatu peningkatan hidup bagi masyarakatnya. Maka Sikap atau pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah

mencapai target yang diinginkan namun belum sepenuhnya permintaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan. Dengan demikian, Struktur birokrasi hanya didasarkan pada standar operating procedure yang dapat mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan di ruang lingkup pemerintah terutama di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pemerintah dalam pengembangan ekonomi di kabupaten sorong sudah sangat baik bagi masyarakat di tiap-tiap kecamatan, oleh karena adanya pembangunan pasar permanen dan juga pasar serbaguna yang dibangun oleh pemerintah agar masyarakat tidak lagi berjualan dengan jarak tempuh yang jauh hingga ke pasar sentral kota sorong.

Untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Anonimous, 2006) menyatakan bahwa wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan nasional dan penyelenggaraan jalan secara umum. Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Sorong sudah berjalan dengan baik dengan sebagaimana yang diharapkan.

Maka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pemerintah perlu memakai bahan-bahan yang berkualitas agar ruas jalan yang dihasilkan dapat bertahan dengan waktu yang cukup lama. Namun untuk saat ini belum seluruhnya ruas jalan yang ada di Kabupaten Sorong sudah diperbaiki dan dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong. Namun belum sepenuhnya harapan masyarakat dapat direspon oleh pemerintah dan belum mencapai target secara maksimal. Indikasinya kondisi struktur jalan masih banyak yang perlu dibangun dan diperbaiki dapat mengingat bahwa

kabupaten Sorong sekarang ini dalam tahap pembangunan sarana dan prasarana daerah misalnya yang sementara di buat saat ini adalah jalan, bandara, terminal, dan bangunan gedung-gedung yang dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pertemuan-pertemuan besar.

Maka pemerintah harus mampu membangun sarana infrastruktur jalan yang dapat mendukung jalannya roda pertumbuhan bagi ekonomi masyarakat. Karena itu, perekonomian dapat dipandang baik jika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dijalankan dengan efisien dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal, oleh sebab itu pembangunan infrastruktur jalan sangatlah bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dalam menopang aktivitas transaksi jual beli hasil pertanian bahkan hasil alam lainnya yang ada di Kabupaten Sorong.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan perekonomian di Kabupaten Sorong sudah berjalan dengan sangat baik, walaupun masih ada pelayanan kepada masyarakat yang belum direspon namun sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat karena Kabupaten Sorong khususnya mengalami banyak peningkatan pada pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan perekonomian masyarakat dengan pembangunan pasar-pasar serbaguna dan pasar-pasar permanen sehingga mendapat kemajuan yang cukup baik dalam memprioritaskan perekonomian masyarakat lokal.
2. Faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan perekonomian

di Kabupaten Sorong khususnya adalah keterbatasan Anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Namun melalui visi dan misi, taraf hidup masyarakat di Kabupaten Sorong mulai meningkat dengan berbagai sektor yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang dapat menjadi saran yaitu sebagai berikut :

1. Dengan demikian diharapkan kepada pemerintah Khususnya Dinas Pekerjaan Umum agar kedepannya dapat melakukan peraturan secara umum antara lain penyusunan petunjuk teknis, kedua, melakukan pembinaan antara lain pemberian sosialisasi dan yang terakhir adalah pembangunan secara umum antara lain melakukan kewajiban dan penyelenggaraan jalan dapat memprioritaskan pemeliharaan jalan, maka semua itu dilakukan hanya demi menetapkan prioritas kehidupan masyarakat lokal.
2. Untuk menanggulangi keterbatasan anggaran negara, maka diharapkan pemerintah daerah mampu menggali potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk memaksimalkan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan Coralie dan White Louise, 1985, *Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang* (terjemahan), Jakarta : LP3ES
- Grindle, Merilee S., 1980, *Politics and Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey, p.11.
- Moleong. L. 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Miles, M. & M. Humberman., 1984, *Qualytatif Data Analysis*, Thousand Oaks, CA: Sage.
Tjokroamidjojo, B., 1984, *Pengantar Administrasi Pembangunan.*, Jakarta : LP3ES.

Todaro, Michael. P., 1998, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, ahli bahasa Haris Munandar, Edisi 6, cetakan I, Jakarta : Erlangga.